



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRVAN WAHYUDRAJAD
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 239944

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 4.717.205.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.487.505.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/120 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.709.700.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 51 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 19.14 m2/19.14 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 817.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XMAX MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, HONDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	277.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	207.038.425
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.018.243.425
III. HUTANG	Rp.	587.425.460
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.430.817.965

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.